

EVALUASI TITIK LOKASI HALTE ANGKUTAN PERDESAAN TRAYEK SITUBONDO – BESUKI KABUPATEN SITUBONDO

EVALUATION OF LOCATION POINTS OF RURAL TRANSPORT STOPS ON THE SITUBONDO – BESUKI TRAY, SITUBONDO DISTRICT

I Made Partha Wira Wicaksana^{1,*}, Wisnu Wardana Kusuma², dan Wisnu Handoko³

^{1,2,3}Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD

Jl. Raya Setu, No. 89, Bekasi, 17520

*E-mail: wparthal1@gmail.com , wisnuwardanakusuma85@gmail.com , wisnuhandoko36@gmail.com

ABSTRACT – Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 41 of 1993 states that users of public transportation should embark and disembark at designated bus stops. These stops, known as halte, are necessary along the routes of public transport, where vehicles must stop to pick up and drop off passengers. Situbondo Regency is one of the regions with high mobility rates, where public transport serves as a preferred mode of transportation. The regency operates two routes: Situbondo - Besuki and Situbondo - Banyuputih. Currently, there are 7 halte along the Situbondo - Besuki route in Situbondo Regency. However, these stops do not currently meet standard guidelines, particularly in terms of main facility standards and halte dimensions. Following analysis, 6 proposed halte have been identified based on an 85th percentile analysis and passenger pocket points identified through preliminary surveys aimed at pinpointing passenger locations and segmenting the route. These proposed halte aim to meet standards in terms of halte dimensions and main facilities as per guideline standards. Therefore, an evaluation of existing halte facilities is necessary, as well as determining the required number of halte and designing new ones to ensure safety and comfort for users, aligning with their primary function of facilitating passenger embarkation and disembarkation.

Keywords: Halte, bus stop, public transport, shelter, passengers

ABSTRAKSI – Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 1993 menyatakan bahwa pengguna angkutan umum seharusnya naik ke dan turun dari bus di tempat henti. Halte adalah tempat perhentian angkutan umum diperlukan keberadaannya di sepanjang rute angkutan umum dan angkutan umum harus melalui tempat tempat yang telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Kabupaten situbondo adalah salah satu kabupaten yang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Angkutan umum menjadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat. Kabupaten ini memiliki 2 trayek yakni, Situbondo - Besuki dan trayek Situbondo - Banyuputih. Kabupaten Situbondo memiliki 7 halte yang dimana halte tersebut berada pada trayek Situbondo - Besuki Kabupaten Situbondo. Tetapi halte tersebut masih belum memenuhi standar pedoman, yang dimana tidak standarisasi tersebut dilihat dari aspek standar fasilitas utama serta standar dimensi halte. seelah dilakukan analisis, terdapat 6 halte usulan yang dimana jumlah halte tersebut didapatkan melalui analisis persentil 85 dan juga melalui titik kantong penumpang. Titik kantong penumpang tersebut didapatkan melalui survei pendahuluan yang dimana bertujuan untuk mendapatkan titik kantong penumpang serta membagi segmen pada trayek tersebut. Halte usulan tersebut diusulkan dilihat dari aspek dimensi halte serta fasilitas utama pada halte yang sesuai dengan standar pedoman. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap fasilitas halte, penentuan jumlah halte yang diperlukan, serta perancangan halte baru untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Kata kunci: Halte, tempat pemberhentian, angkutan umum, shelter, penumpang

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan proses atau aktivitas pemindahan barang dan penumpang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Definisi transportasi mencakup upaya dan kegiatan dalam mengangkut atau membawa barang serta/atau penumpang dari suatu titik ke titik lain. Perkembangan zaman telah membawa kemajuan dalam industri transportasi. Terlihat bahwa transportasi telah mengalami transformasi menjadi lebih modern, termasuk dalam hal angkutan umum. Angkutan umum yang tidak lain diantaranya adalah Bus tentunya memerlukan halte bus untuk menunjang efektivitas dalam penggunaannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.41 Tahun 1993, penumpang angkutan umum diharuskan naik dan turun di tempat pemberhentian yang telah ditentukan. Halte sebagai tempat pemberhentian angkutan umum harus tersedia di sepanjang rute angkutan umum, dan kendaraan angkutan umum wajib berhenti di halte-halte yang sudah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Waktu tunggu yang tidak konsisten membuat konsumen harus menunggu lebih lama di halte. Maka dari itu, k halte yang memiliki standar yang sesuai dengan standarisasi yang ada sangat dibutuhkan untuk menciptakan kenyamanan pengguna halte. Berdasarkan survey yang dilakukan Tim Praktek Kerja Lapangan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 ditemukan beberapa halte yang tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, serta letak beberapa halte yang tidak sesuai dengan titik kantong penumpang yang menyebabkan penggunaan halte masih kurang optimal. Kantong penumpang sendiri adalah tempat yang paling banyak menjadi tempat naik dan turunnya penumpang pada tiap-tiap segmen pada rute trayek angkutan umum. Pembangunan halte yang tidak sesuai dengan titik kantong penumpang permasalahan ini merupakan penyebab dari bertambahnya masalah pada transportasi. Akibatnya, sebagian masyarakat yang semestinya menjadi target konsumen angkutan umum mengalami penurunan minat untuk menggunakannya dikarenakan sulitnya dalam penggunaan halte yang ada. Pembangunan halte yang sesuai dengan titik kantong penumpang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum.

Kabupaten situbondo merupakan satu dari banyaknya kabupaten yang memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Angkutan umum menjadi salah satu moda transportasi pilihan masyarakat. Kabupaten ini memiliki

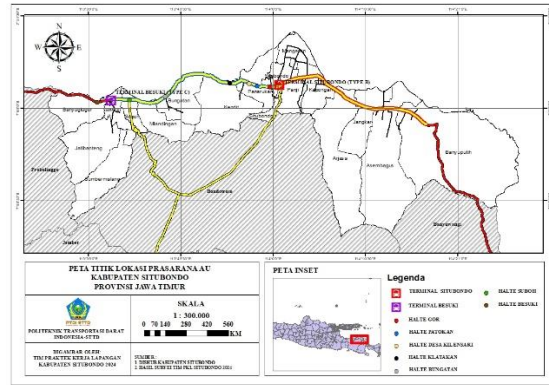
2 trayek yakni, Situbondo - Besuki dan trayek Situbondo - Banyuputih. Trayek Situbondo - Besuki memiliki tingkat mobilitas penggunaan angkutan umum yang cukup tinggi dibanding trayek lainnya. Dilihat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, standar dari pembangunan halte bisa dilihat dari berbagai aspek diantaranya, pelayanan bidang keamanan, kenyamanan dan keteraturan yang masih belum sepenuhnya terlaksana di setiap halte angkutan umum yang ada di kabupaten situbondo.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang bertempat di Kabupaten Situbondo dengan trayek Situbondo – Besuki yang dilaksanakan pada hari senin - selasa tanggal 25 - 26 Februari 2024 pada pukul 07.00 WIB – selesai.

Gambar 1.



Gambar 1 Lokasi Wilayah Kajian

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada Kertas Kerja Wajib ini yaitu meliputi pengumpulan dari berbagai informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan untuk mengadakan Analisa permasalahan pada daerah penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah data sekunder, data primer. data sekunder merupakan data yang didapatkan sebagai data pendukung dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, BAPPEDA, PUPR. data sekunder yang didapat pada penelitian ini meliputi data jaringan trayek angkutan perdesaan kabupaten situbondo, data jaringan jalan, data tata guna lahan, data inventarisasi titik lokasi halte. Data Primer merupakan data yang didapatkan dengan melakukan survei yang dimana data tersebut mengacu pada kejadian yang sebenarnya atau *Eksisting*. Survei yang dilakukan meliputi survey inventarisasi dan survey dinamis. Survei inventarisasi bertujuan untuk mengevaluasi keadaan serta ketersediaan fasilitas halte angkutan umum yang sudah ada, termasuk identifikasi halte, rambu petunjuk, papan informasi, lampu penerangan, tempat duduk, kanopi, tempat sampah, pagar, papan pengumuman, dan kondisi keseluruhan fasilitas tersebut. untuk melaksanakan survei ini, diperlukan peralatan seperti *roll meter papan clip board formulir inventarisasi halte alat tulis ponsel (dokumentasi)*. Survei ini dilaksanakan untuk mengamati, mengukur, serta mencatat data ke dalam formulir survei sesuai dengan target data yang diambil. Hasil akhir dari survei inventarisasi halte ini yaitu panjang, lebar, dan tinggi halte lebar dan tinggi tempat duduk kelengkapan fasilitas utama serta fasilitas tambahan kondisi tata guna lahan. Survei dinamis atau survei di dalam kendaraan (*on bus*) merupakan salah satu jenis survei yang dilakukan di bidang angkutan umum yang dilaksanakan di dalam kendaraan yang menjadi obyek survei. Pada survei dinamis, surveyor berada di dalam kendaraan untuk mencatat jumlah penumpang yang naik dan turun serta mencatat waktu perjalanan setiap segmen yang dilewati pada trayek angkutan umum. Pelaksanaan survei dinamis adalah untuk mendapatkan data kinerja pelayanan angkutan umum untuk mengetahui jumlah penumpang yang diangkut pada trayek tertentu, yaitu total penumpang yang naik dan turun. Setelah mendapatkan jumlah jumlah naik dan turun penumpang, hasil dari survei ini dapat berupa mengetahui total penumpang pada jam sibuk dan tidak sibuk maupun total penumpang per hari yang dapat digunakan untuk menghitung tarif angkutan, mengetahui tingkat kepadatan penumpang pada kapasitas kendaraan, selanjutnya waktu perjalanan, yaitu Waktu kendaraan untuk melalui trayek angkutan dalam sekali jalan, termasuk waktu tundaan, serta waktu henti untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang, selanjutnya produktivitas segmen pada trayek, yaitu total jumlah penumpang yang naik dan turun per waktu pelayanan pada setiap segmen atau total jumlah penumpang yang naik dan turun per kilometer (km) pelayanan. Tujuan dari survei dinamis ini adalah mengidentifikasi letak kantong penumpang pada trayek angkutan umum. Target data yang diperoleh pada survei dinamis waktu dan durasi survey, no plat kendaraan, kode, nama trayek, dan jurusannya, jam keberangkatan dan kedatangan, kapasitas kendaraan, jumlah penumpang yang naik tiap segmen, jumlah penumpang yang turun tiap segmen, waktu tempuh tiap segmen. Hal – hal yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan survei dinamis adalah Perlatan dan perlengkapan seperti formulir survey, alat tulis, clip board, stop watch, telepon genggam/ hp (kamera). Survei dinamis ini dilakukan pada trayek angkutan perdesaan di Kabupaten Situbondo pada trayek Situbondo – Besuki. Tenaga pelaksana yang digunakan untuk melakukan survei dinamis angkutan umum adalah berjumlah 4 taruna/i yang termasuk dalam bidang angkutan umum TIM PKL Kabupaten Situbondo 2024.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan dari berbagai data, baik data sekunder maupun data primer. Berikut merupakan teknik pengumpulan data tersebut. Dari survei dinamis yang telah dilakukan, didapatkan data naik turun penumpang per segmennya. Untuk kantong penumpang sendiri merupakan tempat atau segmen yang memiliki penumpang naik tertinggi. Analisis Kebutuhan Tempat Perhentian Angkutan Perdesaan Berdasarkan Titik Kantong Penumpang. Penetapan jarak antar halte memiliki tujuan untuk menentukan jumlah halte yang ideal pada setiap ruas jalan menurut penggunaan lahan, dapat dilakukan analisis berdasarkan Surat Perintah Direktorat Perhubungan Darat Nomor 271/HK105 /DRJD/96. Penentuan desain standarisasi halte dengan memakai analisis berdasarkan SK. Dirjen Perhubungan Darat Nomor 271 /HK. 105 /DRJD /96. Dilihat dari kondisi eksisting bahwa lintasan angkutan umum biasanya merupakan lintasan yang melewati ruas jalan dan persimpangan, maka lokasi perhentian angkutan perdesaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu Nearside (NS) yaitu tepat sebelum persimpangan, Farside (FS) yaitu tepat setelah persimpangan, Midblock (MB), yaitu terletak pada ruas jalan atau diantara dua persimpangan. Dalam menentukan luas tempat perhentian angkutan umum, jumlah penumpang yang akan dilayani merupakan faktor kunci. Sebagai panduan, luas minimal yang disarankan adalah dengan panjang minimal 4 meter dan lebar 2 meter dan tinggi 2,7 meter. Luas ini dirancang untuk menampung 10 tempat duduk dan menyediakan cukup ruang untuk 10 orang berdiri. Setelah tahapan analisis, maka dapat diusulkan untuk pembangunan halte yang dilihat dari aspek kantong penumpang serta aspek tata guna lahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Halte Kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil survei inventarisasi yang telah dilakukan, terdapat 7 titik lokasi halte yang ada di Kabupaten Situbondo, yaitu :

Tabel 1 Titik Lokasi Halte Eksisting Kabupaten Situbondo

NO	NAMA HALTE	LOKASI LETAK	DIMENSI (m)		FASILITAS	KETERANGAN	
						Ada	Tidak Ada
1	Halte bus dan MPU Desa Kilensari	Jalan Pantura Desa Kilensari Kecamatan Penarukan, Terletak di depan PA Muhammadiyah.	Panjang	6,12	Papan identitas halte		√
					Rambu petunjuk		√
			Lebar	5,91	Papan informasi trayek		√
					Lampu penerangan	√	
			Tinggi	3,01	Tempat duduk	√	
					Kanopi	√	
			Lebar tempat duduk	0,33	Telepon		√
					Tempah sampah		√
			Tinggi tempat duduk	0,4	Dinding Halte	√	
					Pagar		√
2	Halte Bus dan MPU Desa Bungatan	Jalan Pantura Desa Bungatan Kecamatan Bungatan yang terletak di Utara simpang tiga jalan ke Gunung Malang	Panjang	5,2	Papan identitas halte		√
					Rambu petunjuk	√	
			Lebar	1,89	Papan informasi trayek		√
					Lampu penerangan	√	
			Tinggi	2,97	Tempat duduk	√	
					Kanopi	√	
			Lebar tempat duduk	0,3	Telepon		√
					Tempah sampah		√
			Tinggi tempat duduk	0,42	Dinding Halte	√	
					Pagar		√
3	Halte Kecamatan Suboh	Kecamatan Suboh depan Paguyuban MPU sektor barat	Panjang	5,09	Papan identitas halte		√
					Rambu petunjuk		√
			Lebar	1,67	Papan informasi trayek		√
					Lampu penerangan		√
			Tinggi	2,8	Tempat duduk	√	
					Kanopi	√	
			Lebar tempat duduk	0,3	Telepon		√
					Tempah sampah		√
			Tinggi tempat duduk	0,35	Dinding Halte		√
					Pagar		√
4			Panjang	5,15	Papan identitas halte	√	

	Halte Bus dan MPU PB Sudirman	Jalan PB Sudirman Kelurahan Patokan Situbondo di depan GOR Baluran Situbondo	Lebar	2,81	Rambu petunjuk		√
					Papan informasi trayek	√	
					Lampu penerangan	√	
			Tinggi	2,76	Tempat duduk	√	
					Kanopi	√	
			Lebar tempat duduk	0,25	Telepon		√
			Tinggi tempat duduk	0,47	Tempah sampah		√
5	Halte Kelurahan Patokan	Jl. PB Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo (Depan SMPN 1 Situbondo)	Panjang	2,03	Dinding Halte	√	
					Pagar		√
					Papan identitas halte		√
			Lebar	1,8	Rambu petunjuk	√	
					Papan informasi trayek		√
			Tinggi	1,9	Lampu penerangan		√
			Lebar tempat duduk	-	Tempat duduk		√
6	Halte Desa Klatakan	Krojan Timur, Klatakan, Kec. Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur	Tinggi tempat duduk	-	Kanopi	√	
					Telepon		√
			Panjang	5,1	Tempah sampah	√	
					Dinding Halte	√	
					Pagar		√
			Lebar	2	Papan identitas halte		√
			Tinggi	2,75	Rambu petunjuk	√	
7	Halte Kec. Besuki	Jl. Wirobroto, Besuki, Kec. Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur	Lebar tempat duduk	0,3	Papan informasi trayek		√
					Lampu penerangan		√
			Tinggi tempat duduk	0,4	Tempat duduk		√
					Kanopi	√	
			Panjang	5,11	Telepon		√
					Tempah sampah	√	
					Dinding Halte	√	

Dari seluruh halte eksisting yang terdapat di Kabupaten Situbondo Trayek Situbondo – Besuki, masih belum terdapat halte yang memenuhi standar sesuai dengan standar pedoman. Tidak standar tersebut dapat dilihat dari fasilitas utamanya serta ukuran halte yang masih belum sesuai.

2. Analisis Kebutuhan Halte Kabupaten Situbondo

Menentukan kebutuhan halte terdapat beberapa syarat yaitu harus berada dalam lintasan trayek angkutan umum dan terdapat pada kantong-kantong penumpang. Dalam menentukan kebutuhan halte secara teknis tidak ada standar atau ukuran dalam penentuan jumlah penumpang minimal dalam membuat sebuah halte di ruas jalan. Maka dari itu dengan bantuan analisis Statistik Distribusi Frekuensi dapat dibuat standarisasi jumlah penumpang minimal angkutan. Metode distribusi frekuensi digunakan persentil 85 untuk dasar pertimbangan karena angka 85 telah memenuhi untuk menentukan kebutuhan halte. Berikut langkah langkah dalam menentukan standarisasi kebutuhan fasilitas halte di Kabupaten Situbondo. Setelah memperoleh data naik dan turun, dilanjutkan dengan melakukan penentuan interval kelas. Penentuan ini digunakan untuk menentukan lebar interval kelas dengan rumus $K = 1 + 3.3 \log n$, selanjutnya untuk menentukan lebar interval kelas dengan menggunakan jumlah penumpang terbesar dan jumlah penumpang terkecil dengan rumus $C = R / K$. Setelah mendapatkan nilai lebar interval kelas, kemudian melakukan analisis distribusi frekuensi terhadap data dari jumlah penumpang naik turun tiap segmen. Berikut merupakan hasil dari distribusi frekuensi. Dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan nilai persentil 85% diketahui batas minimal penumpang pada suatu ruas jalan yaitu

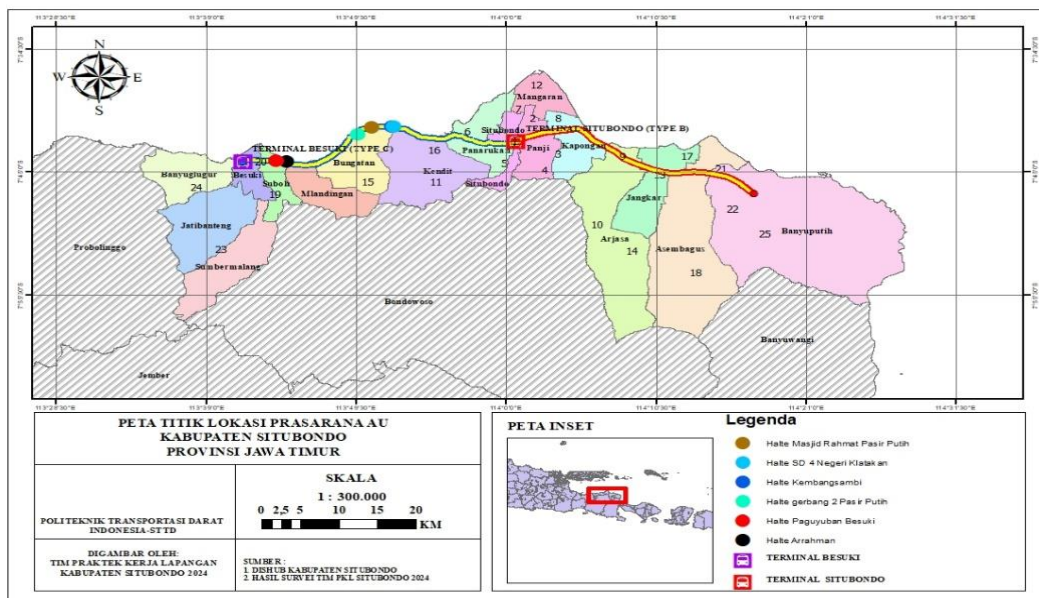
25 penumpang pada tiap segmen. Setelah dilakukan analisis didapatkan kebutuhan halte dengan jumlah minimal penumpang yaitu 25 penumpang terdapat 2 segmen dari 12 segmen. Setelah dilakukan analisis berdasarkan standar jarak tempat henti maka dapat disimpulkan bahwa total kebutuhan halte pada kantong penumpang adalah sebanyak 10 halte.

3. Rekomendasi Halte Usulan Kabupaten Situbondo

Setelah mendapatkan kebutuhan halte selanjutnya menentukan lokasi usulan halte, yang dimana dalam penentuan titik pemberhentian ini, didasarkan dengan pengamatan di lapangan berdasarkan kantong penumpang dan tata guna lahan yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo yang disesuaikan dengan standar Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD/96. Terhadap lalu lintas. Berikut merupakan lokasi titik yang direncanakan untuk pembangunan halte

Tabel 2 Lokasi Halte Usulan

1	SD 4 KLATAKAN - PINTU 2 PASIR PUTIH	5	SDN 4 Klatakan (1), Masjid Rahmat Pasir Putih (2), Jl. Raya Besuki - Situbondo (3) , Gerbang 2 Pasir Putih (4)	4	Campuran jarang : perumahan, ladang, sawah, tanah kosong
2	DESA MLANDINGAN KULON - PAGUYUBAN MPU BESUKI	5	Masjid Arrahman (5), Paguyuban Besuki (6)	2	Campuran jarang : perumahan, ladang, sawah, tanah kosong



Gambar 2 Peta Titik Lokasi Halte Usulan

Berikut merupakan rekomendasi tipe tempat perhentian kendaraan angkutan umum pada trayek Situbondo – Besuki. Berdasarkan kriteria pemilihan tipe tempat pemberhentian yang dianalisis, rekomendasi tempat pemberhentian untuk tiap titik usulan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Kriteria Pemilihan Tipe Tempat Pemberhentian

Kebutuhan	Fasilitas Yang diusulkan
Halte	1. Identitas Halte
	2. Kanopi
	3. Tempat Duduk

	4. Pagar Pembatas
	5. Papan Informasi
	6. Tempat Sampah
Bus Stop	7. Rambu Petunjuk Bus Stop

Dalam penentuan dimensi halte usulan yaitu berdasarkan SK.Dirjen Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD/1996. tentang pedoman teknis perencanaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum, dimensi ukuran minimal halte yaitu panjang 4m x lebar 2m yang dimana berisi 10 kursi untuk duduk dan 10 orang untuk berdiri. Ukuran standar halte sesuai standar yaitu panjang 4m x lebar 2m, dengan luas 8m² dan tinggi minimum 2,7m diukur dari lantai hingga atap paling bawah. Desain halte ini memiliki panjang 4m x lebar 2m dan tinggi 2,7m yang diukur dari lantai hingga atap paling bawah yang dilengkapi dengan identitas halte, kanopi, tempat duduk, pagar pembatas, papan informasi, tempat sampah, serta lampu penerangan. Karena semakin lengkap fasilitas halte, semakin nyaman penumpang menggunakan fasilitas tempat pemberhentian yang ada, karena salah satu faktor masyarakat menggunakan angkutan umum yaitu mendapatkan fasilitas yang nyaman dan aman. Nyaman yang dimaksud yaitu bisa duduk, berteduh serta merasa aman dari panas, hujan, sembari menunggu angkutan umum dan keamanan yang dimaksud mencegah terjadinya kecelakaan apabila adanya kendaraan yang menabrak halte. Identitas halte juga sangat penting untuk mengetahui nama atau nomor pada halte tersebut. Penentuan jenis kelompok tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum atau TPKPU berdasarkan tingkat pemakaian, ketersediaan lahan, dan kondisi lingkungan pada trayek situbondo – besuki ini adalah no 7 pada halte dan no 8 pada bus stop, yaitu nomor 7 yaitu halte yang tidak terpadu dengan trotoar dan tidak dilengkapi dengan teluk bus serta mempunyai tingkat pemakaian tinggi.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis pada bab sebelumnya terkait dengan fasilitas dan prasarana tempat pemberhentian angkutan perdesaan, maka dapat dibuatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Situbondo memiliki fasilitas halte sebanyak 7 halte yang sudah ada pada trayek Situbondo – Besuki, akan tetapi masih belum terdapat halte yang memenuhi standar menurut Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD/96. Serta penempatan titik lokasi halte tersebut kurang optimal yang disebabkan halte tersebut berada bukan pada titik kantong penumpang., berdasarkan hasil analisis kebutuhan fasilitas halte di Kabupaten Situbondo melalui perhitungan persentil 85 dan tata guna lahan yang ada pada wilayah studi yang disesuaikan dengan standar Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.271/HK.105/DRJD/96. Jumlah fasilitas tempat henti yang dibutuhkan yaitu terdiri dari 6 halte yang sudah disesuaikan dengan kantong penumpang dan tata guna lahan, dimensi halte yang dibutuhkan yaitu harus memenuhi ukuran standar minimal yaitu panjang 4m x lebar 2m dan tinggi 2,7m. Dan desain halte yang akan digunakan harus sesuai tata guna lahan dan berdasarkan 10 jenis kelompok tempat perhentian kendaraan penumpang umum.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran terkait pengembangan prasarana halte di Kabupaten Situbondo untuk meningkatkan layanan angkutan umum di Kabupaten Situbondo, disarankan agar daerah menyediakan fasilitas tempat perhentian umum dan bus stop yang lebih lengkap. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan pengguna angkutan umum. Tempat perhentian tersebut harus dibangun berdasarkan analisis kebutuhan dan lokasi, serta perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala, penempatan fasilitas halte harus disesuaikan dengan hasil analisis lokasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan prasarana yang dibangun dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat naik dan turun penumpang angkutan umum, pemerintah Kabupaten Situbondo sebaiknya mengimbau masyarakat pengguna angkutan umum untuk menggunakan halte sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai tempat naik dan turun penumpang, pemerintah Kabupaten Situbondo sebaiknya mengedukasi masyarakat pengguna angkutan umum agar memanfaatkan halte sesuai peruntukannya sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, berdasarkan hasil analisis penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

_, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.

_, 2012, Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar

_, 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta.

_, 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Jakarta.

_, 2019, Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, Jakarta

_, 2019, Peraturan Menteri Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis

Agita, Dika Septavian, Mudjiastuti Handajani, and Ismiyati Ismiyati. 2021. "ANALISIS HALTE BUS TRANS SEMARANG (Studi Kasus Koridor I)." Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil 26(2):143. <https://doi.org/10.32497/wah-anats.v26.i2.3129>.

Agustina, Ida Deliyarti, dan Wiwin Nurzanah. 2018. "STUDI AKSESIBILITAS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN UNTUK PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DI PUSAT KOTA MEDAN." 31 (2): 59.

Dedy Ritonga, James A Timboeleng, dan Oscar H Kaseke, 2015, "Analisa Biaya Transportasi Angkutan Umum dalam Kota Manado Akibat Kemacetan Lalu Lintas", Jurnal Sipil Statik, FT Unsrat, Volume 3, Nomor 1, Januari 2015, h. 58 -67
Farizi, M. N., Sadika, F., Adiluhung, H., Industri, P. D., Kreatif, F. I., & Telkom, U. 2019. Perancangan Ulang Komponen Halte TMB Berdasarkan Kebutuhan Penyandang Disabilitas. 6(2), 3197–3207.

Haryanda, Haryanda, Muhammad Farhan Nasution, Daniel Hutabarat, Abdul Razzaq, and Andrian Syahputra. 2023. "Implementasi Metode Bubble Sort Pada Aplikasi Pencarian Rute Berdasarkan Jarak Tempuh Transportasi Umum." Blend Sains Jurnal Teknik 1 (3): 213–19. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v1i3.183>.

Merdeka, Tembung-lapangan. 2023. "Analisis Kinerja Bus Trans Metro Deli Rute K5M" 2 (2): 39–55.

Nabila, Nurul, Nurhidayat, dan Alaidin Koto. 2024. "PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU." Journal of Sharia and Law 3 (1): 75. Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan, Jakarta

Silondae, Sutami. 2016. "Keterkaitan Jalur Transportasi Dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya." Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan 1 (1): 49–64.

Sugianto, dan Muhammad Arief Kurniawan. 2020. "TINGKAT KETERTARIKAN MASYARAKAT TERHADAP TRANSPORTASI ONLINE, ANGKUTAN PRIBADI DAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PERSEPSI." Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Transportasi Darat Bali 1 (2): 51.

Widayanti, Ari, Anita Susanti, and Dan Agus Wiyono. 2016. "Evaluasi Kualitas Pelayanan Halte

Dan Pengembangannya Dikota Surabaya untuk Mendukung Terwujudnya Infrastruktur Berwawasan Lingkungan." Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan IV, 33–44.